

PEREMPUAN HINDU DI ERA GLOBAL

NI PUTU SUDEWI BUDHAWATI

STAHN Gde Pudja Mataram

ABSTRAKSI

Kedudukan perempuan pada masa lalu tidaklah sebaik yang ada sekarang. Hal itu dapat dipahami melalui dinamika kedudukan perempuan. Berkembangnya konsep *marginalisasi*, *domestikasi*, dan *pengiburumahtangaan* jelas-jelas persoalan sosilogis. Marginalisasi berarti perempuan dikucilkan (*exclusion*) dari kerja upahan atau jenis-jenis kerja upahan tertentu atau penggeseran perempuan ke pinggir (*margins*), maksudnya kecenderungan bagi perempuan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki kelangsungan hidup yang tidak stabil, upah rendah, tanpa dasar keterampilan; atau sebagai proses feminisasi.

Ketika perempuan dibatasi ruang gerak hanya pada arena domestik dalam konteks *home-economics* serta dikembangkan konsep deprivasi kasih sayang ibu (*maternal deprivation*), maka kedudukan perempuan sebagai ‘bengkel’ sosial pembentukan manusia telah membentuk ideologi domestikasi dan atau pengiburumahtangaan (*housewifization*). Secara implisit konsepsi pengiburumahtangaan membawa implikasi bahwa perempuan secara ekonomis tergantung pada suami. Sekalipun di beberapa tempat kedudukan perempuan belum mengalami perubahan yang berarti, tetapi kenyataan lain menunjukkan bahwa kedudukan perempuan telah secara nyata mengalami kemajuan. Mereka tidak lagi hanya sebagai subordinasi, tetapi telah menjadi kekuatan modernisasi, malahan perempuan telah larut di dalamnya. Dalam banyak kasus yang lain, kedudukan perempuan telah mencapai puncaknya, dari kenyataan semakin banyak perempuan sebagai pimpinan organisasi seperti ekonomi, politik dan sosial. Dengan kata lain, perempuan telah mewarnai persaingan dalam urusan publik sebagai perempuan karier dengan segala beban dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu seorang ibu disebut sebagai guru utama dan sekaligus guru pertama (*nasti guru samo mata*).

Kata Kunci : Perempuan hindu, era global

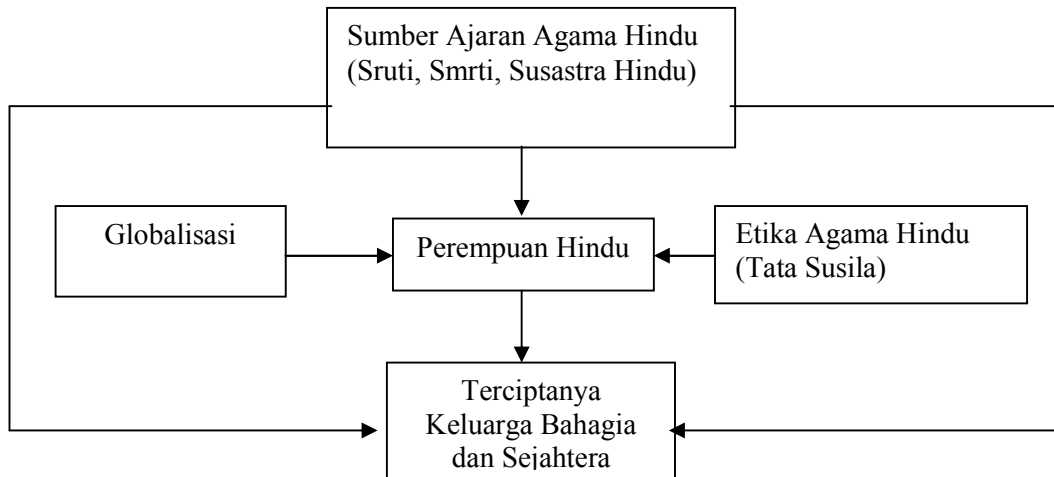
PENDAHULUAN

Kedudukan perempuan pada masa lalu tidaklah sebaik yang ada sekarang. Hal itu dapat dipahami melalui dinamika kedudukan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam *Manusmrti* (Gandhi, 2002: 29), sebagai berikut. “*Sebelum menikah wanita harus tetap berada di bawah perwalian orang tuanya, setelah menikah dia berada di bawah suaminya, dan ketika dia menjadi seorang janda, dia berada di bawah kekuasaan anaknya*”. Kenyataan yang sama dapat pula dilihat melalui banyaknya kasus mengenai pernikahan di bawah umur, tingginya angka anak-anak yang telah menjadi janda, yang berakibat pada besarnya angka ibu muda yang meninggal ketika melahirkan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa perempuan pada masa lalu telah mengalami proses subordinasi laki-laki melalui penguatan struktural dan kultural.

Sekalipun di beberapa tempat kedudukan perempuan belum mengalami perubahan yang berarti, tetapi kenyataan lain menunjukkan bahwa kedudukan perempuan telah secara nyata mengalami kemajuan. Mereka tidak lagi hanya sebagai subordinasi, tetapi telah menjadi kekuatan modernisasi, malahan perempuan telah larut di dalamnya. Dalam banyak kasus yang lain, kedudukan perempuan telah mencapai puncaknya, dari kenyataan semakin banyak perempuan sebagai pimpinan organisasi seperti ekonomi, politik dan sosial. Dengan kata lain, perempuan telah mewarnai persaingan dalam urusan publik sebagai perempuan karier dengan segala beban dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu seorang ibu disebut sebagai guru utama dan sekaligus guru pertama (*nasti guru samo mata*).

Demikianlah, di dalam kitab suci Veda diamanatkan pentingnya pendidikan seorang anak wanita: “*sifat-sifat wanita patut ditumbuh-kembangkan antara lain, berani sebagai perintis (pelopor), sebagai pendukung tugas-tugas yang berat dari suami dan orang tua, cerdas dan cemerlang, menjalankan Dharma bagaikan ibu pertiwi. Dituntun untuk menjadi wanita yang sopan santun, cerdas dan mampu menjadi seorang terpelajar (sarjana), sebagai guru (pembimbing) bahkan sebagai orator, dan bahkan terjun ke medan pertempuran*” (Titib, 1996: 416). Dengan seorang anak wanita mendapat pendidikan yang baik, tentunya dikemudian hari ia akan menjadi ibu yang sangat baik yang akan mampu mendidik anaknya menjadi “*putra yang suputra*”.

Alur Pikir



PEMBAHASAN

Konsep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan

Persamaan kesempatan belajar antara laki-laki dan perempuan berperan besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi Negara. Kesempatan pendidikan antara laki-laki dan perempuan berkorelasi serah dengan penurunan pertumbuhan jumlah penduduk, dan pada gilirannya meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Pemerataan kesempatan pendidikan bagi perempuan juga secara langsung dapat memacu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan, yang secara makro dapat menambah jumlah penduduk produktif dan meningkatkan produktivitasnya nasional. Pemerataan kesempatan pendidikan adalah hak asasi yang melekat pada perempuan agar dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan dan keahlian sehingga dapat memberi kontribusi yang sama dengan laki-laki untuk memacu produktivitas nasional.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan masih dapat ditolerir jika perbedaan tersebut masih sebatas karena perbedaan jenis kelamin. Namun, ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir, yaitu perbedaan karena adanya efek diskriminasi gender (*gender discrimination effect*), yaitu perbedaan kesempatan atau perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem pendidikan, dan perbedaan itu menyebabkan terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya patriaki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, aturan-aturan, mekanisme dan prosedur baku.

Salah satu efek diskriminasi gender ini adalah perbedaan kesempatan secara konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, yang kemudian diketahui sebagai faktor penyebab berbedanya rata-rata penghasilan laki-laki dan perempuan. Walaupun dengan latar pendidikan yang sama rata-rata penghasilan angkatan kerja perempuan secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja, semakin kecil perbedaan rata-rata penghasilan laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa semakin lama intervensi pendidikan yang diberika semakin besar pengaruhnya dalam memperkecil perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan

Gender Mainstreaming dalam Pendidikan

Program Gender Mainstreaming tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, yang antara lain mengemukakan hal-hal penting sebagai berikut :

- Agar setiap instansi pemerintah mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan ke dalam program sektor dan daerah masing-masing.
- Untuk itu dapat dipergunakan pedoman teknis yang disusun oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai acuan.

- c. Kantor Meneg PP bertugas memberikan fasilitas dan bantuan bagi instansi dan daerah yang memerlukan, bekerjasama dengan LSM dan PT yang ada.
- d. Sesuai fungsi dan kewenangannya setiap instansi dan daerah dapat mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan Inpres ini kepada masyarakat (Dalam Handayani,2003:6).

Pendekatan *Gender Mainstreaming* telah dilakukan di dalam kebijakan dan program pembangunan, termasuk pendidikan. *Gender Mainstreaming* mereformulasi kebijakan agar semakin responsif gender, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Teknik analisisnya menggunakan GAP (*Gender Analysis Pathway*) yang telah dikembangkan oleh Direktorat Kependudukan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Perempuan yang bekerjasama dengan *Women's Support Project Phase II-CIDA* dan *ILO*. Dalam perkembangannya, GAP telah berhasil diujicobakan pada 5 sektor pembangunan, termasuk pendidikan (Handayani,2003:7)

Dalam pembangunan pendidikan, 4 (empat) program utama telah dijadikan fokus analisis, yaitu : program pendidikan dasar dan prasekolah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan luar sekolah. Hasil Analisis menemukan beberapa faktor penyebab kesenjangan gender dalam bidang pendidikan. Dengan telah teridentifikasinya berbagai permasalahan gender dalam pembangunan pendidikan, diharapkan pengambil kebijakan dan perencana pendidikan menjadi semakin peka gender dalam menyusun rencana kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan pendidikan. Dampaknya diharapkan dapat memperkecil atau bahkan menghapus kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan.

Program pengarusutamaan gender yang telah dilakukan Bappenas dan CIDA kemudian ditindaklanjuti oleh program-program dimasing-masing sektor. Untuk sektor pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional telah membentuk Pokja Pemerataan Pendidikan untuk Semua yang Berkeadilan Gender yang sementara ini koordinasinya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan luar Sekolah dan Pemuda (Handayani,2003:7).

Tujuan dan Stragi Kebijakan Penyetaraan Gender

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, rumah tangga, bangsa dan negara dalam upaya mempercepat pemahaman arti dan peran pengarusutamaan gender dan perlindungan anak ke seluruh masyarakat, maka perlu dilaksanakan pelatihan tentang gender. Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang pembangunan.

Dalam Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) bidang pendidikan, rumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional perlu mempertegas unsur kesetaraan gender secara eksplisit. Dengan demikian tujuan pendidikan yang lebih berwawasan gender diusulkan agar dirumuskan sebagai berikut.

1. Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
2. Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukan sebagai pengambil keputusan, pengembangan kurikulum, penulis buku, pengelola pendidikan, tenaga kependidikan maupun sebagai peserta didik.
3. Memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme (Handayani,2003:7)).

Tujuan tersebut dicapai melalui beberapa strategi kebijakan penyetaraan gender sebagai berikut.

1. Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jenis dan jenjang pendidikan, dengan memberikan kemudahan bagi perempuan khususnya untuk memilih program-program studi atau jurusan yang bias laki-laki (bias toward male), dengan tetap memperhatikan persyaratan kualitas akademis. Strategi ini diperlukan agar secara bertahap dapat menyeimbangkan jumlah siswa-mahasiswa menurut jenis kelamin pada semua jurusan di sekolah menengah dan dan perguruan tinggi. Kemudahan bagi siswa atau mahasiswa perempuan lebih diarahkan pada jurusan-jurusan IPA di SMU, industri, otomotif, dan pertanian di SMK, serta jurusan-jurusan ilmu keras di perguruan tinggi, seperti ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, biologi, serta berbagai cabang teknologi dan industri. Kemudian bagi siswa perempuan untuk memasuki jurusan-jurusan yang bias bagi laki-laki tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kualitas dan keadilan.

2. Meningkatkan kemampuan para pengembang kurikulum dan para penulis perempuan untuk buku-buku pelajaran secara lebih profesional dan proporsional terhadap laki-laki. Disamping itu masih perlu evaluasi dan penataan kembali isi kurikulum dan buku pelajaran lebih berwawasan gender.
3. Meningkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan menurut gender serta partisipasi perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan di bidang pengelolaan pendidikan nasional (Handayani, 2003:8).

Perempuan dalam Teologi Hindu

Dalam pengertian umum maupun khusus, *gender* berarti keadaan di mana individu yang lahir secara biologis, sebagai laki-laki dan perempuan *memperoleh pencirian sosial* sebagai laki-laki dan perempuan melalui maskulinitas dan femininitas yang sering didukung oleh nilai masyarakat bersangkutan. Jadi, perbedaan yang terjadi bukan semata-mata disebabkan karena perbedaan biologis. Demikian pula berkembangnya konsep *marginalisasi*, *domestikasi*, dan *pengiburumahtangaan* jelas-jelas persoalan sosilogis. Marginalisasi berarti perempuan dikucilkan (*exclusion*) dari kerja upahan atau jenis-jenis kerja upahan tertentu atau penggeseran perempuan ke pinggiran (*margins*), maksudnya kecenderungan bagi perempuan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki kelangsungan hidup yang tidak stabil, upah rendah, tanpa dasar keterampilan; atau sebagai proses feminisasi/segregasi.

Ketika perempuan dibatasi ruang geraknya hanya pada arena domestik dalam konteks *home-economics* serta dikembangkannya konsep deprivasi kasih sayang ibu (*maternal deprivation*), maka kedudukan perempuan sebagai ‘bengkel’ sosial pembentukan manusia telah membentuk ideologi domestikasi dan atau pengiburumahtangaan (*housewifization*). Secara implisit konsepsi pengiburumahtangaan membawa implikasi bahwa perempuan secara ekonomis tergantung pada suami. Hal itu terjadi karena definisi tentang kerja tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan seseorang, melainkan juga menyangkut kondisi yang melatarbelakangi kerja itu, serta penilaian sosial yang diberikan terhadap pekerjaan itu. Seorang ibu rumah tangga yang sedang menyusui anaknya, sementara di lain waktu mencuci pakaian suami, melayani kebutuhan seks suami, menghidangkan makanan kesukaan keluarga ataupun membuat anyaman kain untuk hiasan rumah tangga, acapkali tidak dianggap bekerja, karena ia tidak memperoleh upah dari jenis pekerjaan itu. Pekerjaan jenis itu adalah pekerjaan domestik dan oleh masyarakat telah dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kewajiban seorang perempuan. Itu sebabnya dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki. Dalam sloka *Manawa Darma Sastra* disebutkan:

*Yatra naryastumpujyante,
Ramante tatra dewatah,
Yatraitastu na pujiyante,
Sarwastalah kriyah* (MDS, III,56)

Terjemahan:

Dimana perempuan dihormati,
Di sanalah para dewa-dewa merasa senang,
Tetapi dimana mereka tidak dihormati,
Tidak ada upacara suci apapun yang akan
berpahala

*Jamayo yani gehani,
Capantya patri pujitah,
Tani krtyahatanewa,
Winacyanti samantarah* (MDS, III,58)

Terjemahan:

Rumah dimana perempuannya tidak dihormati
sewajarnya,
Mengucapkan kata-kata kutukan
Keluarga itu akan hancur seluruhnya
Seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib

Sloka di atas menunjukkan bahwa perempuan dalam Hindu bukanlah tanpa arti. Malahan ia dianggap sangat berarti dan mulia, sebagai dasar kebahagiaan rumah tangga. betapa pentingnya peranan perempuan dalam Hindu Dharma, Oleh sebab itu, orang yang ingin sejahtera hendaknya senantiasa menghormati perempuan. Perbedaan penilaian dan perlakuan terhadap perempuan sesungguhnya lebih merupakan konstruksi sosial dan budaya masyarakat setempat. Hindu tidak pernah memberi penilaian yang merendahkan wanita, malahan wanita dianggap sebagai wadah dimana kehidupan, kemuliaan, dan kemajuan itu disemai dan dikembangkan.

Dunia publik menuntut para perempuan untuk mempercantik diri lahir dan batin. Hanya saja kebanyakan perempuan lebih memperhatikan kecantikan lahir misalnya seperti memutihkan kulit, membentuk alis dan melangsingkan tubuh. Padahal menurut lontar *Indra Rukmini Tattwa* disebutkan hal-hal sebagai berikut:

*Kecantikan wajah hilang oleh ketidakmulusan tubuh,
Kecantikan wajah dan kemulusan tubuh hilang oleh ketidakharuman vagina,
Kecantikan wajah, kemulusan tubuh, keharuman vagina hilang oleh kebodohan dalam senggama,
tapi semua itu akan hilang oleh kebodohan rohani
(Indra Rukmini Tattwa dalam Triguna, 2007)*

Sloka di atas jelas menyarankan kepada kaum perempuan untuk lebih memuliakan kecantikan rohani, dimensi lahir sesungguhnya dikalahkan oleh kekuatan rohani. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada istri atau suami saja, melainkan harus diupayakan bersama-sama. Seorang suami dituntut *tanggungjawab* sementara seorang istri dituntut *kesetiaan*. Dalam susastra Hindu disebutkan “jangan sekali-kali engkau menyebut dirimu Bapak, manakala engkau tidak pernah bertanggungjawab terhadap keluargamu. Demikian pula halnya dengan perempuan, “jangan sekali-kali engkau menyebut dirimu Ibu, jika engkau tidak mampu memelihara kesetiaanmu pada suami dan anak-anakmu”. Jadi, antara suami dan istri secara sepintas diberikan penegasan akan kewajiban yang berbeda, namun pada hakikatnya kedua kebajikan itu diharapkan saling bersinergi sehingga mampu menopang terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera atau keluarga *sukinah*.

Peranan istri dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera tidak akan terwujud begitu saja, tetapi harus dibentuk oleh pihak lain secara bersama-sama. Suami, anak, keluarga, dan lingkungan juga akan memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kondisi demikian. Oleh karena itu, setiap suami dan anggota keluarga lainnya harus mampu ikut menciptakan agar wanita senantiasa hidup dengan perasaan senang, senantiasa wajahnya berseri-seri. Hanya dengan kondisi demikian keluarga itu akan diberikan kedamaian, keteduhan, dan pada akhirnya kebahagiaan sejati, sebagaimana dinyatakan dalam sloka-sloka Manawa Dharma Sastra berikut.

Jika sang istri selalu berwajah berseri-seri,
Seluruh rumah akan kelihatan bercahaya
Tetapi jika ia tidak berwajah demikian
Semuanya akan kelihatan suram.
(MDS, III,62)

Sloka di atas sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam, karena setiap anggota keluarga senantiasa diwajibkan agar mampu memelihara ibu, istri, dan wanita yang ada dalam keluarga itu hidup dengan perasaan senang.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Di Dalam rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak-pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Teologi Hindu mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan (*krurakarma*) kepada semua makhluk, terlebih hal itu dilakukan kepada manusia. Secara struktural, setiap manusia dalam dirinya memiliki *rāga* (nafsu), *lobha* (tamak), *kroda* (marah), *mada* (mabuk), *irsya* (iri hati), dan *moha* (bingung) yang harus dikendalikan. Jika asumsi itu digunakan sebagai landasan moral, maka tindakan KDRT jelas menjadi sesuatu hal yang tabu untuk dilakukan. Wanita sebagai fondasi rumah tangga bukan seharusnya menjadi objek kekerasan, melainkan menjadi sesuatu yang dimuliakan. Sebab, jika wanita sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga telah mengalami kesedihan, maka diyakini bahwa keluarga itu akan mengalami kehancuran (MDS,III,57), demikian pula ketika wanita mengalami penderitaan dalam rumah tangga, dan karena itu ia kemudian memutuskan untuk mencari ‘kesenangan’ di luar rumah (kerjanya hanya jalan-jalan), maka hal itu telah menjadi indikasi kuat awal dari ketidakharomisan rumah tangga sebagaimana dinyatakan pada sloka berikut.

*Cocanti jamayo yatra,
Winacyatyacu tatkulam,
Na cacanti tu yatraita,
Warhate taddhi sarwada* (MDS, III,57)

Terjemahan:

Dimana warga wanitanya hidup dalam kesedihan,
Keluarga itu cepat akan hancur,
Dimana wanita itu tidak menderita,
Keluarga itu akan selalu bahagia

Larangan untuk melakukan tindakan KDRT semakin jelas dimuat dalam Sarasamuscaya (VI,153) yang menyatakan bahwa menggoda, memperkosa, dan tindakan yang dengan sengaja melakukan usaha curang dapat menyebabkan umur pendek. Kutipannya sebagai berikut:

na gantavyah sarvavarnesu karkicit,

Na hidrsamanayusyam yathanyastrinisevanam
(S.S VI,153)

Terjemahan:

Menggoda-memperkosa wanita, sengaja usaha curang
Jangan dilakukan; pun jangan melakukan segala
sesuatu Yang berakibat umur pendek.

Akibat lain dari kebiasaan melakukan tindakan kekerasan (*krurakarma*) terhadap seseorang, maka kelak ia akan menjelma menjadi orang penuh dosa, penyakitan, penjahat, suka membunuh, dan pendek umur seperti dinyatakan dalam sloka berikut: *Davskula vyadhibahula dasacarah prahasinah, Bhavantyalpayusah papa roduka kasmalodayat* (SS, 148).

Dari uraian di atas, jelas tergambar bahwa kekerasan dalam segala bentuknya adalah sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama Hindu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih hal itu dilakukan terhadap wanita, maka tindakan itu tidak saja telah melanggar *Rta*-hukum alam, tetapi juga telah melanggar etika sosial rumah tangga. Tindakan kekerasan dapat menyebabkan kemunduran dalam kualitas reinkarnasi.

PENUTUP

Simpulan

1. Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya bila kita mengkaji melalui pendekatan historis melalui kitab suci veda dan susastra Hindu maka kedudukan perempuan sangat terhormat, sejajar dengan kedudukan laki-laki dan bila mampu mengembangkan potensi dan swadharmanya dengan baik, perempuan sangat disegani oleh masyarakat.
2. Terjadinya pelecehan terhadap perempuan disebabkan pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama Hindu serta didukung pula oleh dampak perkembangan agama Hindu di masa lalu yang didukung oleh masyarakat feodal. Melalui pendidikan yang baik, benar dan mantap, khususnya pendidikan budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan, pada saatnya pelecehan wanita tidak akan terjadi lagi, karenanya pendidikan sangat penting bagi perempuan, dengan mendapat pendidikan yang baik, maka dikemudian hari akan menjadi ibu yang baik, mampu mendidik anaknya menjadi "*putra yang suputra*".
3. Peranan istri dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera tidak akan terwujud begitu saja, tetapi harus dibentuk oleh pihak lain secara bersama-sama, seperti oleh suami, anak, keluarga, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandhi, Mahatma. 2002. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Pustaka Pelajar Yogya.
- Handayani, Trisakti, 2003. *Studi Analisis Kebijakan Pendidikan berwawasan Gender Dalam Rangka Pengembangan Potensi Pendidikan*. Universitas Muhamadiyah Malang
- Kajeng, I Nyoman dkk, 2005. *Sarasamuccaya*. Paramita Surabaya
- Pudja, I Gde dan Sudharta, Rai, Tjokorda, 2002. "*Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*". CV. Felita Nursatama Lestari Jakarta
- Titib, I Made, 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Paramita Surabaya
- Yudha, Triguna, Ida Bagus Gde, 2007. *Kesehatan Reproduksi : Perspektif Hindu*. Dirjen Bimas Hindu